

**PERANAN DINAS PERHUBUNGAN DALAM PELAKSANAAN
PERPANJANGAN IZIN TRAYEK ANGKUTAN PERDESAAN
BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN
NOMOR 17 TAHUN 2012**

ARTIKEL ILMIAH

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh
Gelar Kesarjanaa Dalam Ilmu Hukum

Oleh:
NURIL ERLINDA
0910110201



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2013**

LEMBAR PERSETUJUAN

Judul Artikel Ilmiah : PERANAN DINAS PERHUBUNGAN DALAM PELAKSANAAN PERPANJANGAN IZIN TRAYEK ANGKUTAN PERDESAAN BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN NOMOR 17 TAHUN 2012

Identitas Penulis :
a. Nama : Nuril Erlinda
b. NIM : 0910110201
Konsentrasi : Hukum Administrasi Negara
Jangka Waktu Penelitian : 4 bulan

Disetujui pada tanggal: 27 Februari 2013

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Dr. Istislam, SH.,M.Hum
 NIP. 19620823 198601 1 002

Sri Kustina, SH.,CN
 NIP. 19480729 198002 2 001

Mengetahui,
 Ketua Bagian
 Hukum Administrasi Negara

Lutfi Effendi, SH.,M.Hum
 NIP. 19600810 198601 1 002

**PERANAN DINAS PERHUBUNGAN DALAM PELAKSANAAN
PERPANJANGAN IZIN TRAYEK ANGKUTAN PERDESAAN
BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN
NOMOR 17 TAHUN 2012**

Nuril Erlinda

Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya

Email: nurilerlinda@yahoo.co.id

ABSTRAK

Salah satu kewajiban pemilik angkutan perdesaan adalah memperpanjang izin trayek yang telah habis. Agar kewajiban tersebut dapat terlaksana, Dinas Perhubungan berperan dalam pelaksanaan perpanjangan izin trayek angkutan perdesaan. Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris dengan metode penelitian yuridis sosiologis. Adapun hasil penelitian di lapangan, bahwa Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan berperan sebagai pemberi layanan, melakukan pengawasan, memberikan pembinaan/sosialisasi serta evaluasi dan laporan. Hambatan yang dihadapi adalah sulit menghubungi pemilik angkutan perdesaan yang telah habis masa berlaku izin trayek, sulit menentukan waktu bekerjasama dengan POLRI, minimnya dana untuk operasi dan sikap tidak peduli pemilik angkutan perdesaan. upaya yang dilakukan adalah peningkatan pembinaan dan pengawasan, sinkronisasi jadwal, monitoring dan evaluasi, pengayoman dan ketegasan. Saran yang diberikan evaluasi terhadap kinerja perangkat dan program-program Dinas Perhubungan dan tinjauan terhadap peraturan perundang-undangan, serta kerjasama dengan pemilik angkutan perdesaan.

Kata kunci : Peranan, Izin Trayek, Angkutan Perdesaan

ABSTRACT

One of the owner's liability is to extend rural transport route permit that had expired. So that the obligation to do so, the Department of Transportation is instrumental in the implementation of the rural transport route permit renewal. This research is an empirical study with juridical sociological research methods. The research results in the field, that the Department of Transportation Pasuruan role as service providers, to supervise, provide guidance/socialization as well as evaluation and reporting. Obstacles faced is difficult to contact the owner of the rural transport has expired route permit, it is difficult to determine the time to cooperate with the police, lack of funds for operation and uncaring attitude of rural transport owners. efforts are increased guidance and supervision, schedule synchronization, monitoring and evaluation, guidance and firmness. Advice given on the performance evaluation of the

device and the program the Department of Transportation and the review of the legislation, as well as cooperation with the owners of rural transport.

Keywords: Roles, Route Permits, Rural Transport

PENDAHULUAN

sektor transportasi memiliki peranan yang cukup penting dalam peningkatan mobilitas warga, baik dari segi kepentingan umum maupun pelayanan perdagangan barang dan jasa¹. Tidak hanya itu saja, transportasi juga merupakan sarana yang sangat penting dan strategis dalam memperlancar roda perekonomian, memperkuat persatuan bangsa dan negara serta mempengaruhi semua aspek kehidupan bangsa dan negara. Hal ini tercermin semakin meningkatnya kebutuhan akan jasa angkutan bagi mobilitas orang dan barang dari dan keseluruh pelosok tanah air hingga luar negeri. Selain itu transportasi juga berperan sebagai penunjang, pendorong, dan penggerak bagi pertumbuhan daerah yang berpotensi tetapi belum berkembang sebagai upaya peningkatan pemerataan pembangunan².

Kabupaten Pasuruan merupakan kota di Propinsi Jawa Timur yang memiliki karakteristik lalu lintas dimana hanya merupakan awal dan akhir dari suatu perjalanan. Pada saat ini aktivitas masyarakat sedang mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Hal ini mengakibatkan peningkatan intensitas mobilitas perjalanan orang dari dan ke tujuan kegiatan³. Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pemerintahan dan pembangunan di bidang perhubungan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan kepada daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu yang menjadi tugas dari Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan adalah berwenang dalam menerbitkan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek berupa izin angkutan perdesaaan.

Berkaitan dengan izin trayek, adanya aktivitas lalu lintas yang cukup tinggi di Kabupaten Pasuruan tidak menutup kemungkinan terjadinya pelanggaran-

¹Adrian Sutedi, **Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik**, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm 314.

²Rahayu Kartini, **Hukum Pengangkutan**, UPT Penerbitan Universitas Muhammadiyah, Malang, 2007, hlm 53.

³Bidang Angkutan, **Evaluasi Data Base Pelayanan Jasa Angkutan Umum Khusus Angkutan Perdesaan Wilayah Kabupaten Pasuruan**, Pasuruan, Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan, 2010, hlm 1.

pelanggaran. Salah satu yang disorot adalah pelanggaran dalam bidang transportasi yakni perizinan trayek angkutan perdesaan.

Sebagaimana informasi yang didapatkan berdasarkan data pada tahun 2012 dari sejumlah 594 armada tahun 2012 terdapat 136 angkutan umum perdesaan yang izin trayeknya telah habis masa berlakunya. Sedangkan 458 angkutan umum perdesaan masih berlaku izin trayeknya. Dari 136 angkutan perdesaan yang izin trayeknya harus diperpanjang berjumlah 116 pemilik angkutan perdesaan. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan No 17 Tahun 2012 menyebutkan dalam pasal 5 ayat (1) bahwa “Penyelenggaraan angkutan penumpang umum harus dilengkapi dengan izin trayek”. Ayat berikutnya menyebutkan “izin trayek berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang dengan tetap memenuhi ketentuan yang berlaku”. Dari permasalahan tersebut, Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan mempunyai peran yang cukup penting untuk menertibkan kembali permasalahan pelanggaran perizinan angkutan perdesaan. Tertibnya masyarakat dalam bidang perizinan angkutan perdesaan dapat dijadikan tolak ukur keberhasilan Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan sebagai penggerak roda pemerintahan.

Adanya perizinan angkutan perdesaan adalah untuk memberikan kepastian hukum dan hak bagi pemilik angkutan perdesaan agar dapat mengoperasikan kendaraannya. Selain itu, tertibnya perizinan angkutan perdesaan dapat memberikan sumbangan terhadap pendapatan asli daerah. Oleh karena itu penting bagi Dinas Perhubungan untuk mengatur pemilik angkutan perdesaan agar melakukan perpanjangan izin trayek yang telah habis masa berlakunya.

MASALAH

Berdasarkan latar belakang diatas, maka ada beberapa pokok permasalahan yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah peranan Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan dalam pelaksanaan perpanjangan izin trayek angkutan perdesaan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 17 Tahun 2012?

2. Apa hambatan yang dihadapi Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan dalam pelaksanaan perananperpanjangan izin trayek angkutan perdesaan dan bagaimana solusinya untuk menghadapi hambatan tersebut?

METODE

Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian empiris yaitu penelitian yang memperoleh data dari sumber data primer atau data yang diperoleh langsung dari masyarakat⁴. Sedangkan metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis sosiologis yang dimaksudkan untuk menemukan fakta tentang peranan Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan dalam pelaksanaan perpanjangan izin trayek angkutan perdesaan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 17 Tahun 2012.

Data yang diperoleh di lapangan dilakukan melalui wawancara dengan pihak terkait Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan dan pemilik angkutan perdesaan terkait perpanjangan izin trayek angkutan perdesaan serta permasalahan dalam perpanjangan izin trayek angkutan perdesaan dan solusi dalam mengatasi masalah tersebut.

Berdasarkan data yang dikumpulkan, penulis menggunakan teknik menganalisa data dengan deskriptif analisis, yaitu menganalisa data di lapangan yang dinyatakan dalam bentuk kalimat yang mempunyai peranan untuk menjelaskan suatu fenomena yang terjadi. Data dianalisis guna menjawab permasalahan-permasalahan dalam rumusan masalah dan dikaitkan dengan kajian pustaka sehingga didapat kesimpulan dari permasalahan yang diangkat.

PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Kabupaten Pasuruan⁵

Letak geografis wilayah Kabupaten Pasuruan berada pada posisi sangat strategis yaitu jalur regional dan juga jalur utama perekonomian Surabaya-Malang dan Surabaya-Banyuwangi. Kabupaten Pasuruan mempunyai luas

⁴Roni Hanitijo Soemitro, **Metode Penelitian Hukum**, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, hlm 24.

⁵www.pasurukab.go.id diakses pada 2 Januari 2013.

wilayah 147.401,50 ha (3,13 luas Propinsi Jawa Timur) terdiri dari 24 Kecamatan, 24 Kelurahan Kabupaten, 341 Desa dan 1.649 Pedukuhan.

2. Dinas Perhubungan Kabupaten pasuruan

Dinas Pehubungan Kabupaten Pasuruan mempunyai wilayah kerja yang luas, untuk itu dibagi dalam 5 wilayah yaitu⁶:

- a. Wilayah 1 meliputi Kecamatan Gempol, Kecamatan Beji, Kecamatan Bangil, Kecamatan Rembang, Kecamtan Kraton;
- b. Wilayah 2 meliputi Kecamatan Rejos, Kecamatan Grati, Kecamatan Lekok, Kecamatan Nguling, Kecamatan Lumbang, Kecamatan Winongan;
- c. Wilayah 3 meliputi Kecamatan Pohjentrek, Kecamatan Kejayan, Kecamtan Wonorejo, Kecamatan Gondangwetan, Kecamatan Pasrepan, Kecamatan Puspo, Kecamatan Tosari;
- d. Wilayah 4 meliputi Kecamatan Purwosari, Kecamatan Purwodadi, Kecamatan Tukur;
- e. Wilayah 5 meliputi Kecamatan Prigen, Kecamatan Pandaan, Kecamatan Sukorejo.

3. Angkutan Perdesaan Kabupaten Pasuruan

Angkutan perdesaan Kabupaten Pasuruan melayani pergerakan penumpang maupun barang antar desa atau kecamatan. Data trayek yang ada di wilayah Kabupaten Pasuruan sebanyak 33 Jaringan trayek⁷. Jumlah armada pada tahun 2012 sebanyak 594 angkutan perdesaan.

B. Pelaksanaan Perpanjangan Izin Trayek Angkutan Perdesaan

Salah satu tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan tertuang dalam Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 42 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan. Pada pasal 45 Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2008 menyebutkan seksi angkutan mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan angkutan orang dan barang. hal tersebut berkaitan dengan penerbitan izin trayek, termasuk pelaksanaan perpanjangan izin trayek angkutan perdesaan.

⁶Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan, **Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah**, Pasuruan, 2008, hlm 6.

⁷ Bidang Angkutan, *op.cit*, hlm 3.

1. Prosedur Perpanjangan Izin Trayek Angkutan Perdesaan

Pengurusan perpanjangan izin trayek berpedoman pada KM 35 Tahun 2003. Pasal 48 KM 35 Tahun 2003 mengatur tentang persyaratan administrasi untuk perpanjangan izin trayek. Dengan tetap berpedoman Dinas Perhubungan memberikan syarat-syarat administrasi yang lebih memudahkan pemilik angkutan perdesaan dalam mengurus izin trayek. Persyaratan untuk mengurus perpanjangan izin trayek adalah⁸:

- a. Izin usaha angkutan (Fotocopy)
- b. Fotocopy akta pendirian perusahaan dan surat izin usaha perusahaan (SIUP) bagi pemohon yang berbentuk badan usaha, akte pendirian koperasi bagi pemohon yang berbentuk koperasi, KTP bagi pemohon perorangan;
- c. Fotocopy NPWP.

Setelah mengurus persyaratan diatas, Dinas Perhubungan akan mengeluarkan izin trayek berupa surat keputusan yang berlaku 5 tahun dan kartu pengawasan yang berlaku satu tahun. kartu pengawasan setiap tahun wajib diperpanjang. Syarat memperpanjang kartu pengawasan adalah:

- a. Fotocopy STNK;
- b. Fotocopy KTP;
- c. Fotocoy buku uji kir;
- d. Kartu pengawasan yang lama.

Retribusi izin trayek yang harus dibayarkan besarnya diatur dalam pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 17 Tahun 2012. Retribusi izin trayek dibayarkan setiap tahun bersamaan dengan perpanjangan kartu pengawasan. Sebagaimana diatur dalam pasal 12 “masa retribusi izin trayek adalah jangka waktu yang lamanya 5 tahun, dan pembayarannya dapat diangsur setiap tahun bersamaan dengan pembaharuan kartu pengawasan dan pengendalian (KPS)”. Sehingga

⁸ Hasil wawancara dengan Staff Angkutan pada 21 November 2012.

dalam jangka waktu lima tahun ada lima kali perpanjangan kartu pengawasan⁹. Besarnya retribusi tersebut adalah:

Tabel 1.
Besar Retribusi Izin Trayek

Jenis Kendaraan	Kapasitas Tempat Duduk	Tarif/Tahun
Mobil Penumpang	1-8 tempat duduk	Rp 60.000,00
Mobil Bus	9-15 tempat duduk	Rp 90.000,00
	16-28 tempat duduk	Rp 120.000,00
	29 tempat duduk ke atas	Rp 150.000,00

Sumber: *Data sekunder, Dinas Perhubungan, 2012, Diolah*

Besarnya pendapatan asli daerah yang bersumber dari retribusi izin trayek yang diperoleh Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan adalah:

Tabel 2:
Daftar PAD Izin Trayek Tahun 2012

BULAN	REALISASI (Rp)
Januari	1.230.000,-
Februari	1.829.800,-
Maret	1.831.600,-
April	1.824.600,-
Mei	1.511.800,-
Juni	2.634.000,-
Juli	1.340.000,-
Agustus	962.400,-
September	3.369.600,-
Oktober	1.476.000,-
November	2.074.800,-
Desember	2.032.800,-
Jumlah	Rp 22.117.400,-

Sumber: *Data Sekunder, Dinas Perhubungan, 2012, Diolah*

2. Pelanggaran Izin Trayek Angkutan Perdesaan

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan 11 pemilik angkutan perdesaan, faktor yang menyebabkan tidak memperpanjang izin trayek antara lain sudah dijual, tidak ada waktu, terhalang biaya, penumpang sepi, penghasilan sedikit, semakin banyak kendaraan bermotor, menjamurnya ojek.

⁹*Ibid.*

3. Jenis Sanksi Administrasi Bagi Pelanggaran Terhadap Izin Trayek Angkutan Perdesaan.

Pasal 24 Peraturan Kabupaten Pasuruan Nomor 17 Tahun 2012 mengatur mengenai sanksi administrasi yang berbunyi “wajib retribusi yang tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan bunga sebesar 2% setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD”. Sedangkan untuk sanksi pidana diatur dalam pasal 26 yaitu “wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 bulan atau pidana denda paling banyak 3 kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar”.

C. Peranan Dinas Perhubungan dalam Pelaksanaan Perpanjangan Izin Trayek Angkutan Perdesaan

Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan adalah unsur pelaksana otonomi daerah yang bertanggungjawab kepada Bupati¹⁰. Dinas Perhubungan melaksanakan urusan wajib pemerintahan di bidang perhubungan. Salah satunya adalah penerbitan izin trayek. Izin trayek yang dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan di wilayah Kabupaten adalah izin trayek angkutan perdesaan. Sebagaimana dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pasal 176 huruf d menyebutkan “izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek diberikan oleh Bupati untuk penyelenggaraan angkutan orang yang melayani trayek perdesaan yang berada dalam satu wilayah kabupaten”.

Izin trayek yang dimaksud dalam penelitian ini adalah dokumen berupa surat keputusan dan akta pengawasan. Kedua dokumen tersebut wajib diregistrasi ulang atau diperpanjang apabila angkutan perdesaan yang digunakan masih beroperasi. Hal ini juga berkaitan dengan pendapatan asli daerah. Berkaitan dengan penertiban izin trayek angkutan perdesaan, Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan melaksanakan peranannya dalam hal perpanjangan izin trayek angkutan perdesaan dengan jalan:

¹⁰Pasal 2 ayat 1 Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 42 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan.

1. Pelayanan yang Cepat dan Mudah

Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan, ada beberapa hal yang harus menjadi pertimbangan pemerintah daerah, yaitu dengan otonomi daerah pembinaan dan pengawasan tidak semata-mata hanya pada bagaimana meningkatkan pendapatan asli daerah, namun harus memprioritaskan pelayanan publik, karena itu juga merupakan hak masyarakat yang sebaliknya menjadi kewajiban pemerintah daerah¹¹.

Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan berupaya memberikan pelayanan yang mudah dan cepat kepada pemilik angkutan umum perdesaan. Hal ini terlihat dari beberapa persyaratan yang tidak menyulitkan pemilik angkutan umum perdesaan untuk memenuhinya. Pelayanan yang diberikan bersifat efektif namun tetap berpedoman pada ketentuan yang ada¹².

Berdasarkan pasal 12 Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 17 Tahun 2012 menjelaskan mengenai masa retribusi. Dijelaskan “masa retribusi izin trayek adalah jangka waktu yang lamanya lima tahun, dan pembayarannya dapat diangsur setiap tahun bersamaan dengan pembaharuan kartu pengawasan dan pengendalian”. Izin trayek tidak dibayarkan dalam waktu lima tahun sekali guna memberikan kemudahan bagi pemilik angkutan umum perdesaan untuk memenuhi persyaratan administrasi. Apabila kartu pengawasan tersebut tidak diperbaharui maka pemilik angkutan umum perdesaan dikenakan sanksi. Sebab pembaharuan kartu pengawasan berhubungan erat dengan retribusi izin trayek¹³.

Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan juga memberikan pelayanan yang cepat dalam pengurusan izin. Pelayanan cepat yang dimaksud adalah pemilik angkutan umum perdesaan yang mengurus izin tidak perlu menunggu lama untuk terbitnya suatu izin. Dinas perhubungan memberikan estimasi waktu selama 30 menit surat izin

¹¹ Andrian Sutedi, *Ibid*, hlm 5.

¹² Hasil wawancara dengan Kepala Seksi Angkutan pada 20 November 2012.

¹³ Wawancara dengan Kepala Seksi Angkutan pada 19 November 2012.

trayek baik itu berupa surat keputusan atau kartu pengawasan¹⁴. Dengan adanya pelayanan yang mudah dan cepat ini maka memungkinkan pemilik angkutan untuk memenuhi kewajibannya sebagai pemilik angkutan umum perdesaan agar mematuhi peraturan-peraturan yang telah ada.

2. Pengawasan terhadap Izin Trayek Angkutan Perdesaan

Dalam melaksanakan fungsi pengawasan, Dinas Perhubungan melakukan pengawasan kegiatan angkutan umum perdesaan melalui kartu pengawasan. Sebagaimana telah disebutkan kartu pengawasan digunakan untuk memudahkan kontrol yang berlaku selama satu tahun terhadap aktivitas angkutan umum perdesaan. dengan adanya kartu pengawasan Dinas Perhubungan akan mengetahui apakah izin trayek yang diberikan sudah diregistrasi ulang atau belum.

Pengawasan juga dilaksanakan dalam rangka penegakan hukum. Penegakan hukum dilakukan oleh Dinas perhubungan dengan menerapkan sanksi-sanksi yang ada. Dalam pelaksanaan sanksi terhadap pelanggaran izin trayek, Dinas Perhubungan bekerjasama dengan pihak kepolisian. Kerjasama ini diwujudkan dalam bentuk melakukan operasi di jalan raya atau di terminal terhadap angkutan umum. Kegiatan operasi ini menjadi salah satu tugas pokok seksi pengendalian dan operasional. Dari adanya operasi ini dapat diketahui pemilik angkutan umum mana yang melanggar aturan-aturan¹⁵.

Kegiatan operasi dilakukan rutin oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan 2 kali dalam sebulan. Kegiatan operasi dilakukan bersama-sama dengan pihak kepolisian karena kedua belah pihak sama-sama memiliki tujuan, yakni penertiban dalam lalu lintas. Sehingga dalam pelaksanaannya pihak Dinas Perhubungan menyesuaikan jadwal dengan pihak kepolisian¹⁶. Beberapa pelanggaran-pelanggraan yang biasanya dilakukan oleh pemilik angkutan umum perdesaan adalah¹⁷:

¹⁴ Hasil wawancara dengan Staff Angkutan pada 21 November 2012.

¹⁵ Hasil wawancara dengan Kepala Seksi Angkutan pada 20 November 2012.

¹⁶ Hasil wawancara dengan Kepala Seksi Pengendalian dan Operasional pada 4 Februari 2013.

¹⁷ *Op.cit*, pada tanggal 19 November 2012.

- a. Melakukan kegiatan penarikan penumpang diluar trayek;
- b. Izin trayek (surat keputusan atau kartu pengawasan) mati atau telah habis masa berlakunya;
- c. Pembelian mobil angkutan yang tidak dibalik nama;
- d. Tidak melaporkan penjualan mobil angkutan milik pribadi.

Dalam rangka penegakan hukum atas pelanggaran-pelanggaran terhadap izin trayek, Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan melakukan proses operasi bekerjasama dengan pihak kepolisian. Operasi dilakukan dalam rangka pemberian efek jerakepada pemilik angkutan umum perdesaan. berikut adalah ketentuan-ketentuan saat operasi di lapangan: sebagai¹⁸:

- a. Pada saat operasi, pemilik angkutan umum perdesaan supir wajib menunjukkan STNK, SIM, Kartu pengawasan, dan buku uji kir.
 - b. Apabila ada pelanggaran terhadap surat keputusan, kartu pengawasan dan buku uji kir, yang berwenang menindak adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan.
 - c. Setelah penilangan, semua berkas-berkas yang telah diperoleh diserahkan ke Kordinator Pengawas kemudian dibawa ke kepolisian untuk direkap ulang dan setelah itu oleh pihak kepolisian dibawa ke Pengadilan Negeri untuk diproses/sidang.
 - d. Pemilik angkutan setelah diproses di Pengadilan Negeri tetap wajib memperpanjang izin trayeknya di Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan sesuai dengan retribusi yang wajib dibayarkan.
3. Pembinaan/Sosialisasi kepada Pemilik Angkutan Perdesaan

Salah satu pendekatan pembinaan yang digunakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan adalah dengan memberikan sosialisasi. Sosialisasi diadakan setiap 3 bulan sekali di tempat yang berbeda. Sosialisasi dilakukan terminal-terminal atau ditempat pusat berhentinya angkutan perdesaan.

¹⁸*Op.cit.*

Sosialisasi tidak hanya diberikan kepada pemilik angkutan perdesaan dan supir, melainkan kepada pelajar. Sosialisasi diadakan setiap 3 bulan sekali di tempat yang berbeda. Sosialisasi dilakukan terminal-terminal, di Dinas Perhubungan atau di pendopo. Sosialisasi ini diberikan dalam rangka untuk mensosialisasikan peraturan-peraturan yang baru, penyuluhan tentang izin trayek, cara berlalu lintas dengan baik, penerbitan surat peringatan/teguran lisan kepada pemilik angkutan perdesaan, dan sebagainya yang berhubungan dengan lalu lintas dan angkutan jalan.¹⁹

Pelaksanaan pembinaan dapat dilakukan setiap saat dengan melihat situasi dan kondisi yang memungkinkan untuk segera dilakukan pembinaan. Kegiatan pembinaan melibatkan pihak kepolisian sebagai pemberi materi. Dinas Perhubungan sebagai fasilitator dan manajemen pelaksanaan pembinaan²⁰.

4. Evaluasi dan Laporan

Evaluasi dan laporan ini dibuat oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan guna sebagai tolak ukur keberhasilan selama beberapa kurun waktu tertentu dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Pelaporan dilakukan setiap bulan kepada Kepala Dinas Perhubungan. Laporan yang dibuat berisi tentang beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Perhubungan dari semua bidang beserta penyelesaiannya serta keberhasilan suatu program kegiatan²¹.

Berkaitan dengan salah satu faktor utama penyebab pemilik angkutan tidak memperpanjang izin trayek, yaitu penghasilan yang sedikit, Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan melakukan tinjauan tarif retribusi sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 10 ayat 1 dan 2 Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 17 tahun 2012. Disebutkan pada ayat (1) “tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali. Ayat (2) berbunyi “paninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1)

¹⁹ Hasil wawancara dengan Kepala Seksi Pembinaan dan Keselamatan pada 17 Februari 2012.

²⁰ *Ibid.*

²¹ *Ibid.*

dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian”.

D. Hambatan Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan dalam Pelaksanaan Perpanjangan Izin Trayek Angkutan perdesaan²²

1. Hambatan Internal

- a. Sulit menghubungi pemilik angkutan perdesaan mengenai masa izin trayek yang sudah habis

Dinas Perhubungan kesulitan untuk menghubungi pemilik angkutan umum perdesaan ketika diketahui izin trayek kartu pengawasannya telah habis. Sebab, terkadang kalau harus mendatangi/menghubungi satu-persatu pemilik angkutan umum perdesaan dirasa cukup sulit untuk ditindak dan membuang banyak waktu.

- b. Sulit menentukan waktu untuk bekerjasama dengan pihak kepolisian

Dalam melaksanakan operasi, Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan bekerjasama dengan pihak kepolisian. Yang menjadi permasalahan adalah sulitnya menentukan waktu yang tepat untuk mensikronkan kegiatan masing-masing.

- c. Minimnya Dana Untuk Operasi Gabungan

Salah satu kendala Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan adalah ketika bekerjasama dengan pihak kepolisian untuk melakukan operasi gabungan. Kondisi ini diketahui saat operasi gabungan Dinas Perhubungan membutuhkan 5 pihak kepolisian, namun yang ikut melakukan operasi bisa sampai 11 polisi. Tentu ini menambah anggaran biaya pengeluaran.

2. Hambatan Eksternal

Hambatan eksternal dalam pelaksanaan perpanjangan izin trayek salah satunya adalah sikap tidak peduli oleh pemilik angkutan perdesaan. salah satu yang menjadi faktor penyebab adalah minimnya penumpang. Hal ini disebabkan semakin banyak munculnya jasa angkutan ojek. Karena itu pemilik angkutan umum perdesaan merasa rugi mengeluarkan biaya untuk

²²²² Hasil wawancara dengan Kepala Seksi Angkutan pada 20 November 2012.

retribusi izin trayek sedangkan penghasilan yang didapatkan tidak sebanding.

E. Upaya Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan dalam Menangani Hambatan yang Dihadapi

1. Solusi Untuk Mengatasi Hambatan Internal

a. Peningkatan Pengawasan dan Pembinaan

Peningkatan pengawasan saat uji kir, dapat mengurangi kesulitan dari pihak Dinas Perhubungan untuk menghubungi pemilik angkutan yang habis masa berlakunya. Pengawasan saat uji kir diberikan melalui peringatan lisan.

Pembinaan dilakukan dalam rangka memberikan penyuluhan-penyuluhan terhadap keselamatan penumpang, izin-izin yang harus dipatuhi, dan sebagainya yang berhubungan dengan kewenangan Dinas perhubungan. Pembinaan ini Dinas Perhubungan juga memberikan teguran atau peringatan atas pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pemilik angkutan umum perdesaan. Solusi lain adalah dengan mengirimkan surat teguran kewajiban untuk memperpanjang izin trayek bagi pemilik angkutan perdesaan yang tidak memperpanjang izin trayeknya.

b. Sinkronisasi jadwal saat awal pembentukan program

Operasi gabungan dilakukan bekerjasama dengan pihak kepolisian untuk menertibkan berbagai pelanggaran-pelanggaran. Tidak hanya pelanggaran-pelanggaran yang berkaitan dengan izin trayek namun juga pelanggaran-pelanggaran terhadap lalu lintas. Adanya penyesuaian jadwal yang terencana dengan pihak kepolisian di awal pembentukan kegiatan menjadi salah satu upaya Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan untuk menjalin kerjasama yang baik. Apabila di lapangan ditemukan suatu kendala maka Dinas Perhubungan tetap berupaya untuk melakukan operasi sebagaimana kondisi semestinya dalam rangka penegakan hukum.

c. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan Evaluasi dilakukan tidak hanya terhadap program kegiatan namun juga terhadap anggaran dana. Evaluasi dapat dilakukan dengan memotong beberapa anggaran yang dianggap tidak perlu. Sisa dari anggaran yang terpotong dapat dialihkan untuk kegiatan lain yang dianggap perlu. Sehingga perlu adanya evaluasi kembali terhadap anggaran dana untuk masing-masing kegiatan agar semua kegiatan yang diprogramkan dapat terlaksana dengan baik.

2. Solusi Untuk Mengatasi Hambatan Eksternal

Keberadaan ojek yang dianggap sebagai salah satu faktor pelanggaran terhadap pengurusan izin trayek perlu mendapat perhatian baru. Pemilik angkutan umum merasa rugi ketika harus mengurus izin sedangkan pendapatan yang diterima sedikit atau berkurang, sebab keberadaan ojek mulai bertambah di terminal-terminal. Ojek-okek yang sudah resmi adalah binaan Polres, yang menjadi perhatian adalah adanya ojek-okek liar yang juga menarik penumpang di terminal-terminal. Dalam rangka mengayomi pemilik angkutan perdesaan maka sosialisasi terhadap ojek perlu dilakukan²³. Salah satu usulan dari pemilik angkutan adalah adanya penertiban kembali keberadaan ojek. Penertiban ini dilakukan dengan cara memberikan tempat tersendiri beroperasinya.

Guna menunjang terlaksananya suatu aturan maka Dinas Perhubungan memberikan ketegasan kepada pemilik angkutan umum agar dengan kondisi apapun untuk tetap memenuhi persyaratan yang ada. ketegasan ini dilakukan dengan tidak pandang bulu terhadap penegakan hukum.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Peranan Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan dalam pelaksanaan perpanjangan izin trayek angkutan perdesaan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 17 Tahun 2012 telah berperan sebagai pemberi pelayanan. Pelayanan yang diberikan adalah dalam hal pelayanan

²³ Hasil wawancara dengan Kepala Seksi Pengendalian dan Operasional pada 4 Februari 2013.

yang cepat dan mudah. Disamping pelayanan, Dinas Perhubungan juga melakukan pengawasan. Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan adalah saat uji kir dan pengawasan di lapangan yang bekerjasama dengan POLRI. Pengawasan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dinas Perhubungan juga memberikan pembinaan/sosialisasi kepada pemilik angkutan perdesaan setiap tiga bulan sekali. Selain itu Dinas Perhubungan melakukan evaluasi dan laporan yang dilaksanakan setiap bulan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas tugas yang dilaksanakan.

2. Dinas Perhubungan dalam melaksanakan peranannya terhadap pelaksanaan perpanjangan izin trayek angkutan perdesaan menghadapi beberapa hambatan. Hambatan-hambatan tersebut berupa hambatan internal dan eksternal. Hambatan internal Dinas Perhubungan adalah dalam hal pengawasan yakni sulit menghubungi pemilik angkutan perdesaan mengenai izin trayeknya yang sudah habis, sulit menentukan waktu untuk bekerjasama dengan pihak kepolisian, serta minimnya dana untuk operasi gabungan. Sedangkan hambatan eksternal adalah berkaitan dengan pembinaan/sosialisasi, yaitu sikap tidak peduli pemilik angkutan perdesaan..
3. Solusi atas hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan adalah sebagai berikut:
 - a. Solusi Untuk Hambatan Internal:
 1. Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan sebagai bentuk solusi untuk mengatasi sulitnya menghubungi pemilik angkutan perdesaan mengenai izin trayek yang sudah habis. Pengawasan dilakukan saat uji kir. Solusi lain adalah pengiriman surat teguran kepada pemilik angkutan yang tidak memperpanjang izin trayek.
 2. Sinkronisasi Jadwal Saat Pembentukan Program sebagai bentuk solusi untuk bekerjasama dengan POLRI agar dapat terlaksana kegiatan pengawasan di jalan.
 3. Monitoring dan Evaluasi dilakukan tidak hanya terhadap program kegiatan namun juga terhadap anggaran dana. Evaluasi dapat dilakukan dengan memotong beberapa anggaran yang dianggap

tidak perlu dan dialihkan untuk kegiatan yang perlu mendapat tambahan anggaran dana.

b. Solusi Untuk Hambatan Ekseternal

Adanya sikap tidak peduli dari pemilik angkutan umum perdesaan, maka Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan bersikap tegas terhadap pemilik angkutan umum perdesaan yang melakukan pelanggaran diantaranya dengan memberikan surat teguran tertulis/lisan agar pemilik angkutan memenuhi ketentuan peraturan yang berlaku. Selain itu perlu adanya pengayoman melalui kerjasama dengan kepolisian untuk meminimalisir adanya ojek-ojek liar yang tidak resmi yang berada di wilayah terminal-terminal.

B. Saran

1. Bagi Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan

Dinas Perhubungan perlu melakukan evaluasi terhadap kinerja perangkatnya dan program-program kegiatan mulai dari pembinaan hingga pengawasan agar tugas-tugas yang diemban dapat terlaksana dengan maksimal. Perlu ada tinjauan ulang terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan dikaitkan dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat agar peraturan perundang-undangan yang dibuat dapat terlaksana.

2. Bagi Pemilik Angkutan Perdesaan

Pemilik angkutan perdesaan dianjurkan agar dapat bekerjasama dengan baik dengan pihak Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan terkait pelaksanaan perpanjangan izin trayek. Sudah semestinya pemilik angkutan perdesaan harus menaati peraturan-peraturan yang ada. Alangkah baiknya pemilik angkutan memberikan saran atau keluhan kepada Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan mengenai kondisi fakta di lapangan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Adrian Sutedi, **Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik**, SinarGrafika, Jakarta, 2011.

Rahayu Kartini, **Hukum Pengangkutan**, UPT Penerbitan Universitas Muhammadiyah, Malang, 2007.

Ronny Hanitijo Soemitro, **Metodologi Penelitian Hukum**, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Keputusan Menteri Nomor 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum

Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 17 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Trayek

Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 42 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan

Data Instansi

Bidang Angkutan, *Evaluasi Data Base Pelayanan Jasa Angkutan Umum Khusus Angkutan Perdesaan Wilayah Kabupaten Pasuruan*, Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan, Pasuruan, 2010.

Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan, *Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*, Pasuruan, 2008.

Internet

www.pasuruankab.go.id diakses pada 2 Januari 2013